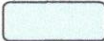
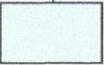
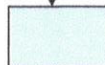


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 329.g/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2026
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
SUBBAGIAN TATA USAHA URUSAN KEUANGAN	DISAHKAN OLEH  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP. 197408052005011002	
		NAMA SOP
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 8. Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 9. Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Swakelola 10. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah melalui Penyedia 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 12. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Pendidikan SMA/ sederajat 2. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa 3. Ditetapkan dengan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan SK Pemeriksa/ Penerima Barang	
KETERKAITAN: 1. SOP Persediaan Barang 2. SOP Pembuatan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 3. SOP Aset Tetap	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi LPSE/ E-Purchasing 4. Aplikasi Digipay 5. Bela Pengadaan 6. ATK	
PERINGATAN: 1. Pengadaan Barang/ Kontruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan 200 Juta dengan Pengadaan Langsung 2. Pengadaan Barang/ Kontruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas 200 Juta dengan Tender 3. Pengadaan Jasa Konsultasi sampai dengan 100 Juta dengan Pengadaan Langsung 4. E-Purchasing oleh Pejabat Pengadaan sampai dengan nilai 200 Juta	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. SK Panitia Pengadaan, Pemeriksaan dan Penerima Barang dan Jasa 2. Kerangka Acuan Kerja 3. HPS 4. DIPA 5. Rencana Pengadaan 6. Kontrak/ Surat Perintah Kerja 7. Berita Acara Serah Terima Barang	

SOP BELANJA BARANG

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Panitia pengadaan barang	PPK	Penyedia barang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Panitia pembantu PPK menerima pengajuan belanja barang dari penanggung jawab kegiatan				Pengajuan belanja barang, DIPA, POK	1 hari		
2.	Pengajuan belanja barang diketahui dan ditandatangani oleh PPK				Pengajuan belanja barang, DIPA, POK	1 jam	Pengajuan belanja barang yang ditandatangani PPK	
3.	Panitia pembantu PPK menyusun standar harga				Dokumen data dukung penawaran harga	2 hari	Standar harga	
4.	HPS ditetapkan oleh PPK				Dokumen data dukung penawaran harga	1 hari	HPS	
5.	Panitia pembantu PPK memilah kebutuhan barang sesuai pagu yang tersedia				Pengajuan belanja barang yang disetujui PPK, DIPA, POK	1 hari	Kebutuhan belanja barang yang sudah terpilah (dikelompokkan)	
6.	Panitia pembantu PPK melaksanakan belanja barang				Pengajuan belanja barang yang disetujui PPK, DIPA, POK, kontrak, kuitansi	2 hari	Barang	